

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Disrupsi adalah sebuah inovasi atau ancaman yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara atau sistem yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien serta lebih bermanfaat (Kasali, 2017: 34). Dengan beralihnya sistem kearah penggunaan teknologi yang canggih, banyak jasa yang kemudian merasa terancam dengan posisinya yang kemungkinan besar dapat digantikan oleh teknologi, terutama jika tidak mengembangkan inovasi dan kompetensinya masing-masing.

Besarnya pengaruh teknologi di era disrupsi saat ini turut mempengaruhi dunia Pendidikan. Dunia telah menyaksikan digitalisasi Pendidikan yang cepat dalam dekade terakhir (Wycliff Edwin Tusiime, et, al; Uni Eropa, 2013; Farrell et al. 2007). Secara khusus, ada minat yang tumbuh dalam integrasi teknologi digital dalam bidang pendidikan. Ketertarikan seperti itu sering didasarkan pada asumsi bahwa teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas Pendidikan saat ini (Wycliff Edwin Tusiime, et, al ;Toit, 2015; UNESCO, 2009; Trucano, 2005). Dengan kenyataan demikian, beberapa negara berusaha untuk semakin meningkatkan ketersediaan teknologi digitalnya di sekolah-sekolah, salah-satunya adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah Uganda yang tentunya bertujuan untuk mendukung pedagogi berbasis teknologi dalam program pendidikan guru (Wycliff Edwin Tusiime, et, al ;Uganda, 2014; Mutonyi & Norton, 2007 ; Farrell, 2007; Uganda MoES, 2006). Penelitian (Hasniza et al., 2013; Chai et al., 2013) telah melaporkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran saat ini mengharuskan guru untuk mengembangkan pengetahuan teknologi (perangkat keras dan perangkat lunak digital), pedagogi (metode pengajaran ), dan konten (materi pelajaran yang sebenarnya untuk diajarkan).

Berdasarkan penelitian dari Sukartono (2017), pendidikan mengalami disrupsi yang begitu hebat. Peran guru selama ini sebagai satu-satunya penyedia

Riskawati, 2020

**PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ilmu pengetahuan sedikit banyak bergeser menjauh darinya. Di masa mendatang, peran dan kehadiran guru di ruang kelas, akan semakin menantang dan membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Menurut Tapscott (1997), perkembangan teknologi internet dan kemajuan teknologi digital berpengaruh terhadap dunia pendidikan guru dan tenaga pendidikan, terutama bagaimana kompetensi guru harus diorientasikan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seorang guru harus melek teknologi agar mampu mengajarkan kepada siswa bagaimana cara literasi media dengan benar, yaitu literasi media yang tidak hanya dipahami dengan kemampuan untuk mengoperasikan computer tetapi literasi media yang juga diarahkan pada pengokohan nilai moral.

Kompetensi guru yang dimuat dalam pasal 10 Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 yaitu: “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” (UU No.14 Tahun 2005). Komponen-komponen kompetensi guru tersebut kemudian diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007, diantaranya:

1. Kompetensi paedagogik: a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. c) mengembangkan kurikulum yang terkait mata pelajaran yang diampu, d) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memanfaatkan pembelajaran, f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
2. Kompetensi kepribadian: a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik

dan masyarakat, c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, d) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3. kompetensi sosial: a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain,
4. Kompetensi professional: a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Guru adalah suatu profesi, hal tersebut ditegaskan dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. Salah satu ciri suatu profesi adalah ketersediaan Organisasi Profesi yang mengawal pelaksanaan tugas-tugas profesional anggotanya melalui tri dharma organisasi profesi : Ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi, meningkatkan mutu praktik pelayanan profesi dan menjaga kode etik profesi. Organisasi profesi menjadi unsur pokok karena signifikansinya bagi kemunculan, perkembangan, dan kesinambungan disiplin-disiplin atau profesi-profesi baru, serta bagi terjadinya revolusi struktural dalam suatu disiplin keilmuan (Dryden dalam Kuhn, 2001).

Sebagai jabatan profesi, guru harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi. Dalam hal ini Organisasi Profesi Keguruan sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Seperti

Riskawati, 2020

**PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang di jelaskan dalam pasal 41 UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independent yang bertujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu wadah yang mampu meningkatkan dan menguatkan kompetensi guru adalah organisasi profesi keguruan.

Pentingnya menguatkan dan meningkatkan kompetensi guru terutama di era disrupsi saat ini tentunya sebagai bekal bagi guru untuk mendidik siswa di era serba teknologi sekarang, karena “Kompetensi guru dalam proses pembelajaran sangat menentukan kemajuan akademik dan nonakademik anak didik, dan kemampuan guru dalam proses pembelajaran merupakan salah satu pilar utama peningkatan mutu Pendidikan” (Fransisca, 2015: 213). Selain itu, kompetensi guru juga sangat berkaitan dengan pembentukan karakter siswa, hal ini disebabkan karena guru yang langsung berhadapan dengan anak didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan (fransisca,L et,al, 2015; Kunandar, 2008). Sehingga sekolah menjadi salah satu lingkungan tempat pembentukan karakter anak berlangsung (Marzuki, Murdiono, & Samsuri, 2011). Jadi Guru yang berkualitas adalah syarat penting untuk menciptakan pendidikan karakter yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam proses seleksi guru, kompetensi calon guru harus menjadi pertimbangan utama (Nurkolis, 2012).

Karakter yang perlu ditransferkan kepada siswa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Perpres No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter adalah “PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab”. Terutama pada nilai-nilai yang dimiliki bangsanya melalui pendidikan kewarganegaraan (Chai dan Chain, 2014) ; Oleh karena itu, guru di era disrupsi harus mampu mencetak siswa yang berkarakter sebagai warga negara Indonesia yang

Riskawati, 2020

**PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dengan bekal pendidikan karakter tersebut, siswa mampu menyikapi teknologi yang semakin maju ini. Sebagaimana dijelaskan bahwa warga Negara adalah manusia dengan atribut tertentu yakni memiliki identitas, kepemilikan hak dan kewajiban, keterlibatan dalam masalah publik dan penerimaan atas nilai-nilai social (Cogan & Derricot, 1998).

Realita yang terjadi di era disrupsi saat ini, masih banyak guru yang ditemukan belum memiliki kompetensi digital yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ndawula et al. (2013) menunjukkan bahwa beberapa guru tidak memiliki komponen pelatihan teknologi dalam program pendidikan guru profesional mereka. Selanjutnya Hakim dan O'Bannon (2008) mencatat bahwa penelitian sebelumnya telah menggarisbawahi masalah kurangnya kompetensi digital guru, yang berarti bahwa mereka tidak dapat bertindak sebagai mentor yang kompeten untuk siswa mereka. Sementara di era revolusi saat ini, perilaku generasi muda menjadi perhatian karena banyaknya kenakalan remaja yang dilakukan misalnya tindakan *bullying*, seks bebas, pemakaian narkoba yang sangat mengkhawatirkan di kalangan anak muda, LGBT, rasisme, ketidakdisiplinan, dan kenakalan lainnya. (Nurizka,R & Lukitoaji,D,2019). Sebagaimana dalam sebuah artikel, dijelaskan bahwa “perubahan dunia secara cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global, termasuk lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedualian social dalam berbagai keadaan”. (Nurhaidah, 2015).

Makalah yang ditulis oleh Raja Damaitu dan Saptarini (IKAPI, 2017) Dalam tulisannya menegaskan bahwa nilai-nilai pancasila memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dengan perkembangan globalisasi meskipun tidak secara menyeluruh. Sebagai contoh pada sila pertama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, namun pada tatanan global, masing-masing individu menganggap kelompoknya yang paling benar. Kemudian sila kedua dan ketiga yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan persatuan, namun globalisasi mampu memecah rasa nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Lalu pada sila ke empat yang menggambarkan nilai kerakyatan dan demokrasi. Sekalipun globalisasi dapat membentuk masyarakat yang individualistic, namun menurutnya tidak akan sulit untuk mewujudkan nilai kerakyatan. Dan yang terakhir adalah sila

Riskawati, 2020

**PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ke lima yaitu keadilan social atas bangsa Indonesia yang semestinya lahir dari meratanya kepentingan rakyat, namun globalisasi justru telah memisahkan secara tegas dan menciptakan kelas dalam masyarakat. Menurut Sari dalam Eleanora (2019) bahwa kelemahan dalam implementasi pemahaman Pancasila disebabkan juga karena adanya pengaruh intern dan ekstern, dimana intern dalam diri yang bersangkutan dan ekstern berasal dari luar.

Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran peneliti, sehingga perlu adanya sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Organisasi Profesi Keguruan untuk mengembangkan kompetensi guru agar menjadi pendidik profesional dan berkarakter, serta mampu membaca tantangan zaman, karena keberadaan seorang guru begitu penting untuk memberikan sumbangsih dalam membentuk watak dan karakter peserta didik. Pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan kognitif bisa saja suatu hari di gantikan oleh teknologi, namun penanaman karakter perlu untuk dilatih, dibiasakan dan diwariskan.

Kosasih Djahiri (1992 : 11) mengemukakan bahwa, “seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan. Akan tetapi, ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya”. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan peserta didik untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap dan mental anak didik. Penanaman keterampilan, sikap dan mental ini tidak bisa sekedar tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Masalah diatas bukanlah sesuatu hal yang baru, dimana sejak tahun 1997/1998 Indonesia telah mengalami krisis Multidimensi yang dampaknya hingga saat ini terus terasa dan tak kunjung selesai. Berawal dari adanya krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, kepemimpinan dan yang sangat fatal adalah adanya krisis akhlak dan moral yang mempunyai dampak berkelanjutan sampai hari ini. Krisis yang semula merupakan krisis identitas menjadi lebih dalam karena menyangkut masalah hati nurani yang mencerminkan adanya krisis karakter, terlebih lagi adanya krisis yang berkaitan dengan jati diri.

Seiring dengan realitas diatas, peningkatan dan penguatan kompetensi guru menjadi sangat penting ditengah derasnya digitalisasi. Sebab penanaman karakter, jiwa, dan jati diri Bangsa ini dilakukan dengan Pendidikan. Imam Santoso menyatakan “Pembinaan watak merupakan tugas utama pendidikan”. Seseorang yang berkarakter akan mempunyai keberanian menyampaikan pendapatnya secara baik, benar, tegas tetapi santun. Sehingga orang yang berkarakter tidak cukup hanya sebagai seseorang yang baik saja (*good man*), tetapi orang yang mampu menggunakan nilai baik tersebut melalui suatu daya juang untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu sebagai warganegara yang baik (*good citizenship*).

Sebuah penelitian yang dilakukan di kota malang oleh Nurcahya (2019) bahwa Penyebab terjadinya dekadensi moral dalam proses pembelajaran dikatakan bahwa ada beberapa factor, salah-satunya adalah factor globalisasi. Pengaruh globalisasi yang sangat kuat, mengharuskan bangsa Indonesia untuk membentengi masyarakatnya agar terhindar dari dampak negative globalisasi. Maka sejak awal telah di siapkan perisai untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu perisai yang dimaksud disini adalah pembelajaran PKn atau *Civic education* sebagai wahana yang sangat penting bagi kelangsungan serta alat untuk mempertahankan bangsa ini dari gempuran pengaruh asing yang diciptakan oleh globalisasi, sebab “PKn bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be good and smart citizens*) dengan komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional” (Kariadi,2016). Namun perlu diketahui bahwa tugas perbaikan karakter anak didik tidak hanya di emban oleh guru PPKn saja, tapi semua orang yang berstatus pendidik, juga oleh pemerintah, Lembaga Pendidikan, organisasi profesi, masyarakat dan orang tua.

Integrasi teknologi di era disrupsi ini yang muncul ke dalam lingkungan pendidikan dan kehidupan sehari-hari telah memungkinkan pengembangan media digital dan lingkungan *e-learning* di mana Sumber Daya Terbuka dan Objek Pembelajaran mengekspresikan potensi pendidikan terbaik mereka (Mezarina *et. al.*, 2015, hal. 90). Namun, Menurut Budimansyah dalam Sutrisno (2019) bahwa

Riskawati, 2020

**PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

permasalahan pembelajaran PKn terletak pada rendahnya kualitas guru dan dosen dalam mengembangkan model pembelajaran, konsep pembelajaran yang kurang menggambarkan nuansa demokratis. Sehingga guru harus menguasai teknologi dalam pembelajaran, namun tetap bersumber pada pemahaman tentang konsep jati diri bangsa serta mempertahankan nilai-nilai kepribadian bangsa yang bermartabat (cogan&derricot,1998)

Pada aspek ini, Aguirre menyebutkan bahwa bidang kompetensi adalah pengembangan keterampilan terkait yang "dibutuhkan baik oleh guru maupun siswa. Mereka dapat mempromosikan penggunaan strategi belajar-mengajar inovatif yang dimediasi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi. Guru harus mengembangkan keterampilan tertentu dalam teknik komputer, memperbarui profesional berkelanjutan, metodologi pengajaran sesuai dengan tantangan dan sikap terhadap teknologi baru. Selain itu, guru harus mengembangkan serangkaian kompetensi yang memungkinkan mereka untuk mengelola teknologi, pedagogik, informasi, komunikatif, dan aksiologis dengan tepat. Jelaslah bahwa seorang guru tidak dapat membuat siswa mampu mengembangkan kompetensi yang tidak sepenuhnya dimilikinya (Luz levano, dkk 2019).

Tuntutan yang dihadapi oleh sekolah di era disrupsi saat ini adalah penggunaan media digital, mengingat digitalisasi yang terus meningkat tidak dapat diatasi melalui upaya individu tunggal. Dengan demikian, masing-masing guru akan dengan cepat merasa terlalu banyak bekerja (Seufert & Scheffler, 2016). Selain itu, digital kompetensi harus mencakup keterampilan dalam penggunaan media digital dan peralatan yang kompeten serta sikap terhadap digitalisasi (menumbuhkan keterampilan digital siswa, konten digital, dan penggunaan media digital dalam pendidikan).

Hal diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisbeth Amhag, Lisa Hellström dan Martin Stigmar (2019), dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Penelitian yang dilakukan di Swedia menunjukkan 87% responden menyampaikan bahwa mereka membutuhkan pelatihan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) baik sedang atau luas untuk membuat siswa berfungsi secara online. Kompetensi untuk menggunakan TIK secara efektif dalam proses pembelajaran semakin penting ketika alat teknologi berubah dengan cepat di

Riskawati, 2020

**PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan TIK untuk situasi mengajar perlu terus menerus *follow up*. Sebab kita tidak dapat mengharapkan calon guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka ketika pendidik guru sendiri kurang terlatih. Solusinya adalah mengorganisasikan pelatihan dalam jabatan yang terstruktur untuk meningkatkan motivasi di kalangan pendidik guru. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sabine Seufert, Josef Guggemos dan Eric Tarantini (2018) yang menunjukkan bahwa guru membutuhkan sebuah pelatihan kompetensi digital yang dilakukan oleh sebuah Komunitas Pembelajaran Profesional Online (PLC online) yang berlangsung dalam kerangka kerja (PLC online) lintas sekolah.

Sebagaimana guru mengembangkan keterampilan profesionalnya, maka perlu pula mengembangkan Komunitas Profesional di antara para guru untuk mendukung manfaat belajar bersama dan dari satu sama lain adalah sangat penting (Seufert, S et al, 2018,. Hord, 1997). Artinya, Komunitas Profesional Pembelajaran yang memanfaatkan potensi informasi digital dan komunikasi menjadi semakin penting sebagai sarana untuk terus mengembangkan digital Guru. Koehler dan Mishra (2009) menambahkan aspek teknologi pada aspek pengetahuan profesional ini. Mereka memasukkan pengetahuan teknologi sebagai jenis pengetahuan baru dan berbeda.

Sejalan dengan fungsi Organisasi Profesi Keguruan yaitu sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan inovasi pendidikan ke-arah yang lebih baik, tentunya untuk mencapai tujuan melahirkan generasi yang berjiwa pancasila. Dalam arti bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berperadaban dan cinta tanah air maka penting untuk meningkatkan dan menguatkan kompetensi guru terutama di era disrupsi saat ini. Sebab kompetensi guru yang memadai dan mampu membaca tantangan zaman akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa.

Organisasi Profesi Keguruan senantiasa berusaha mengembangkan profesionalisme anggotanya secara berkelanjutan. Dalam artian bahwa setiap guru yang bergabung dalam organisasi tersebut akan senantiasa *upgrade* kemampuannya sebagai tenaga pendidik yang professional. Tujuan tersebut secara langsung mendeskripsikan bahwa Organisasi Profesi Keguruan mampu menjadi

Riskawati, 2020

**PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

wadah, penyumbang dan penggerak dari setiap kegiatan diberbagai bidang profesi. Penyalur aspirasi sekaligus menjadi sebuah solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi khususnya dalam bidang pendidikan. Organisasi ini memberikan harapan yang nyata bahwa bukan tidak mungkin mengembangkan dan mempertahankan karakter generasi bangsa di era teknologi mampu untuk dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hal pokok yang patut untuk digaris bawahi adalah, bahwa karakter bisa dibentuk melalui proses pendidikan dan pembiasaan. Sebagaimana Aristoteles terkenal dengan pernyataannya bahwa karakter itu adalah suatu kebiasaan (*character is habit*), dan guru sangat berperan penting dalam hal ini. Sebab sekolah menjadi salah satu lingkungan tempat pembentukan karakter anak berlangsung (Marzuki, Murdiono, & Samsuri, 2011). Meski demikian, tantangan yang dihadapi di era disrupsi cukup berat. Pada penelitian terdahulu tentang kompetensi guru telah banyak diteliti, namun dalam penelitian ini sendiri akan meneliti tentang bagaimana meningkatkan dan menguatkan kompetensi guru kaitannya dengan peranan Organisasi Profesi Keguruan dalam menghadapi tantangan zaman.

Melihat besarnya dampak era disrupsi saat ini, sehingga penting untuk mengetahui sejauh mana peran dari Organisasi Profesi Keguruan dalam mewujudkan visinya agar tercipta generasi yang beradab dan Negara yang berperadaban melalui pengembangan dan pembentukan guru PPKn yang professional. Sehingga judul yang menjadi fokus penelitian ini adalah **“PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI”**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka persoalan yang dapat dirumuskan yaitu era disrupsi ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal ini turut mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia untuk ikut serta dalam persaingan global. Akan tetapi, hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi guru khususnya guru PPKn dalam mengolah produk

Riskawati, 2020

**PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

teknologi menjadi sebuah media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Sehingga, melahirkan banyaknya guru yang tidak profesional dan masih menggunakan pola-pola lama dalam mengajar serta tidak menggambarkan nuansa demokratis. Hal tersebut juga berdampak pada siswa yang tidak cakap, tidak memiliki daya saing, dan tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman secara bijaksana.

Demi ketajaman analisis, rumusan masalah tersebut dispesifikasi menjadi sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran organisasi profesi keguruan dalam membina dan menguatkan kompetensi guru PPKn di era disrupsi?
- b. Apakah kompetensi guru saat ini (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional) sudah cukup bagi guru PPKn di era disrupsi?
- c. Bagaimana efek peran organisasi profesi keguruan dalam mengembangkan kompetensi digital kepada guru PPKn terhadap pembelajaran PPKn yang lebih demokratis?
- d. Apa upaya dan kendala yang dihadapi Organisasi Profesi Keguruan dalam menguatkan kompetensi guru PPKn di era disrupsi?

### **1.3. Tujuan**

#### **1.3.1. Tujuan umum:**

Menganalisis peran Organisasi Profesi Keguruan dalam menguatkan kompetensi guru PPKn di era disrupsi

#### **1.3.2. Tujuan khusus:**

- a. Mengidentifikasi peran Organisasi Profesi Keguruan untuk membina dan menguatkan kompetensi guru PPKn di era disrupsi
- b. Mengidentifikasi kompetensi guru PPKn yang perlu di kembangkan di era disrupsi
- c. Mengidentifikasi dampak peran organisasi profesi keguruan dalam mengembangkan kompetensi digital guru PPKn terhadap pembelajaran yang lebih demokratis
- d. Mengidentifikasi upaya dan kendala yang dihadapi oleh organisasi profesi keguruan dalam menguatkan kompetensi guru PPKn di era disrupsi

### **1.4. Manfaat penelitian**

Riskawati, 2020

*PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan solusi dalam menguatkan kompetensi guru PPKn di era disrupsi melalui pembinaan yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Keguruan agar mampu melahirkan guru yang profesional, cakap teknologi dan memahami *digital citizenship* dalam rangka mendidik siswa yang cerdas dan berkarakter serta di tengah kuatnya arus teknologi di era disrupsi.

#### **1.4.2. Manfaat Analisis Kebijakan**

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan organisasi profesi keguruan terhadap dunia pendidikan, agar mengambil langkah konkrit untuk membuat suatu inovasi dalam menguatkan kompetensi guru PPKn terutama dalam menghadapi tantangan zaman.

#### **1.4.3. Manfaat Isu serta Aksi Social**

Diharapkan mampu memberi pencerahan bagi warga Negara, terutama bagi pendidik agar senantiasa meningkatkan dan menguatkan kompetensinya dengan mengikuti berbagai kagiatan dan pelatihan untuk memperkuat keprofesionalannya sebagai seorang pendidik ditengah arus teknologi. Sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab dan berbudi luhur.

#### **1.4.4. Manfaat Praktis**

Selain memberikan manfaat secara teoritis, kebijakan dan isu serta aksi social, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, sebagai berikut:

- a. Agar dapat dijadikan referensi bagi guru PPKn/pendidik, untuk senantiasa mencari wadah dalam mengembangkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi saat ini.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi para pendidik, agar senantiasa melakukan upaya dan inovasi untuk menguatkan karakter siswa sebagai generasi muda pelanjut estafet perjuangan bangsa Indonesia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Organisasi Profesi Keguruan khususnya untuk semakin berinovasi dalam menguatkan kompetensi guru PPKn di era

Riskawati, 2020

**PERAN ORGANISASI PROFESI KEGURUAN UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DI ERA DISRUPSI**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

disrupsi, serta mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang terjadi. Sehingga nantinya ada perbaikan dan pengembangan bagi Organisasi Profesi Keguruan dalam memaksimalkan perannya untuk melakukan pembinaan terhadap para pendidik.

### **1.5. Struktur Organisasi Tesis**

#### **Bab I:**

Pendahuluan, merupakan rasional yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Isi dari bab ini meliputi; a) Latar belakang penelitian, b) Rumusan Masalah. c) Tujuan penelitian, d) Manfaat penelitian dan, e) Struktur organisasi tesis.

#### **Bab II:**

Kajian Pustaka, merupakan gambaran berbagai konsep, generalisasi dan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Isi dari bab ini meliputi: a) organisasi Profesi Keguruan, b) kompetensi dasar guru, c) Kompetensi digital bagi guru, d) Era Disrupsi, e) Globalisasi, f) Kompeten yang harus dipertahankan dan diperhatikan dalam dunia pendidikan di era disrupsi.

#### **Bab III:**

Metode Penelitian, merupakan penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Isi dari bab ini meliputi; a) Pendekatan penelitian, b) Metode penelitian, c) Partisipan dan tempat penelitian, d) instrument penelitian, e) Teknik pengumpulan data, f) Teknik analisis data dan, g) Teknik pengujian keabsahan data.

#### **Bab IV:**

Temuan dan pembahasan, merupakan gambaran data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian di analisis dengan menggunakan berbagai teori yang relevan. Isi bab ini adalah; a) Deskripsi subyek penelitian, b) Deskripsi Temuan Penelitian, c) Deskripsi hasil temuan penelitian, d) Analisis hasil penelitian.

#### **Bab V:**

Simpulan dan saran, merupakan jawaban dari aspek yang diteliti. Isi bab ini adalah; a) Simpulan, b) Implikasi dan, c) Rekomendasi.